

PENILAIAN KINERJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENGUNAKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT

Yuli Fitriyani¹⁾, Tia Febrianti²⁾

¹⁾²⁾ Politeknik Negeri Tanah Laut

Jl. Ahmad Yani Km.06 Desa Panggung, Pelaihari, Kalimantan Selatan

¹⁾ yulihazami@politala.ac.id

²⁾ 1801302051.akt@politala.ac.id

Diterima: 05 Agustus 2020. Disetujui: 28 Desember 2020. Dipublikasikan: Desember 2020

Abstrak

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat penting dan bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA salah satu entitas laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan keuangan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pengguna atau pembaca laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja laporan realisasi anggaran, yang didalamnya terdapat informasi mengenai anggaran belanja pendapatan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan perhitungan analisis rasio efektivitas pada Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan rata-rata rasio anggaran 2017 sampai dengan 2019 tingkat kinerja tidak efektif sebesar 34,89%, rasio efisiensi pada Belanja Daerah yang menunjukkan bahwa keseluruhan rata-rata pada tahun 2017 sampai dengan 2019 memiliki kriteria cukup efisien sebesar 85,70.

Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Laporan realisasi anggaran, Penilaian kinerja

Abstract

The Budget Realization Report (LRA) is a report published by the local government providing very important and useful information for assessing regional financial performance. LRA is one of the financial reporting entities that are responsible for regional finances. Based on the Budget Realization Report the user or reader of this research report is to find out and analyze the performance of the budget realization report, which includes information about the regional revenue expenditure budget. The analytical method used in this research is a quantitative descriptive method, using the calculation of the effectiveness ratio analysis on Regional Original Income which shows the average 2017 to 2019 budget ratio ineffective performance levels of 34.89%, the efficiency ratio in Regional Expenditures which shows that the overall average in 2017 to 2019 has the criteria of being quite efficient at 85.70%.

Keywords : *Effectiveness, Efficiency, Budget Realization Report, Performance Assessment.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini mengalami kemajuan setelah adanya pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kegiatan atau skedul pemerintahnya secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada negara dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Selain itu, juga membuat pemerintah daerah dapat

mengelola keuangan secara tertib sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, bertujuan untuk mempererat kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur urusan Otonomi Daerah, menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan diterapkannya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Pemerintah diberi hak dan kewajiban serta wewenang dalam menjalankan aktivitasnya secara mandiri.

Sebagaimana dengan adanya berbagai dampak otonom daerah salah satunya yaitu perubahan pola tanggung jawab daerah terhadap alokasi dana yang dimiliki pemerintah daerah. Otonomi daerah memberi kebebasan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termasuk menyusun sebuah anggaran. Hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah sesuai yang diinginkan masyarakat.

Anggaran merupakan suatu rencana mengenai pertimbangan kinerja yang akan diperoleh oleh suatu organisasi atau instansi untuk jangka waktu tertentu, yang dinyatakan secara kuantitatif pada umumnya dinyatakan dalam bentuk finansial. Dalam sektor publik, anggaran terkait dengan perangkat yang memiliki tanggungjawab atas pengelolaan dana publik pemerintah daerah dan pelaksanaan aktivitas yang dibiayai oleh pemerintah, anggaran memiliki peran penting bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga aktivitas yang dijalankan sesuai dengan rencana awal.

Di Indonesia dalam membuat suatu anggaran, pemerintah daerah harus menyusun dan menerapkan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah agar anggaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan harapan masyarakat pada waktu yang akan datang. Dalam penyusunan anggaran yang baik harus dilakukan secara jelas, nyata, rapi, rinci dan disiplin. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting, hal ini karena adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik periode mendatang dan juga dapat menilai kinerja pimpinan organisasi sektor publik. Perencanaan sebuah anggaran daerah dibuat terdiri atas beberapa kebijakan anggaran dan perencanaan operasional. Langkah pertama yaitu menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga arah dan kebijakan umum sudah termasuk dalam kebijakan anggaran yang menjadi pedoman pada suatu perencanaan operasional anggaran.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana yang memuat daftar rincian pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun yang telah diterapkan oleh peraturan daerah. Juga sebagai rancangan kerja organisasi pemerintah daerah yang dimuat dalam bentuk angka dan melampirkan adanya sumber penerimaan, dimana target sebagai minimal dan beban sebagai batas maksimal. Tujuan dari APBD tersebut untuk membiayai seluruh aktivitas operasional di suatu daerah serta menggambarkan apakah laporan realisasi dari anggaran daerah sudah sesuai dengan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan yang memuat tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya (APBD).

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau instansi pemerintah daerah. Selain itu, dengan

tingkat efisiensi dan efektivitas kita dapat melihat apakah penyerapan anggaran sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu LRA juga sangat diperlukan bagi pengguna laporan keuangan pemerintah untuk membantu mengawasi kinerja pada suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan sebuah laporan dimana memuat tentang informasi realisasi pendapatan, belanja, dan biaya dari suatu entitas yang akan dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Adanya Laporan ini dapat diketahui bahwa informasi tentang kondisi ekonomi yang diterima untuk membiayai program pemerintah daerah serta akibat atas suatu kondisi ekonomi tersebut. Permasalahan jika Laporan Realisasi Anggaran ini tidak dipublikasikan, maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pada pengguna laporan keuangan atau anggaran sudah efektif dan efisien dalam melakukan realisasi suatu anggaran selama satu tahun.

Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam melakukan penilaian antara pengeluaran yang dihasilkan terhadap penerimaan yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, efektivitas dan efisiensi adalah isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi atau organisasi pemerintah yang ingin berusaha agar mendapatkan kriteria efektif dan efisien dalam anggaran tersebut. Secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi adalah suatu pencapaian target dengan menggunakan biaya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah dinas yang berlokasi di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70815. Kegiatan atau program yang dijalankan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ialah diperoleh dari dana APBD Kabupaten Tanah Laut yang harus sesuai dengan harapan masyarakat dan digunakan sebaik mungkin. Sehingga dana yang diberi dapat dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Terlepas dari bagaimana Dinas Ketahanan Pangan, dan Perikanan membuat sebuah anggaran. Tercapainya realisasi dari anggaran ialah suatu hal utama yang penting diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menilai langsung kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam hal ketelitian dalam mengerjakan tugasnya, mengontrol penggunaan anggarannya, dan mengetahui seberapa besar kemampuan kerja yang dicapai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan proses dimana peristiwa pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam satuan moneter. Transaksi yang terjadi umumnya bersifat keuangan dan pelaporannya termasuk dalam pelaksanaan masalah pemerintah daerah dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chumairah, 2020). Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:35) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur dimana terdapat pencatatan transaksi moneter dan harus dilaporkan atas terjadinya transaksi tersebut bertujuan untuk dijadikan informasi bagi pengambil keputusan ekonomi.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah, hal ini yang menjadi pedoman bagaimana kinerja

pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (Chumairah, 2020). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang menggambarkan terkait kinerja dan kondisi keuangan entitas tersebut. Pengguna laporan tersebut salah satunya pemerintah pusat yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sebab pemerintah pusat telah memberikan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Laporan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP, 2019) "Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya".
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Menurut KSAP (2019), "Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya."
3. Neraca
Menurut KSAP (2019), "Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu."
4. Laporan Operasional
Menurut KSAP (2019), "Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya."
5. Laporan Arus Kas
Menurut KSAP (2019), "Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kass pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu."
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Menurut KSAP (2019), "Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya."
7. Catatan Laporan Keuangan (CaLK)
Menurut KSAP (2019), "Catatan Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar".

2.3 Kinerja

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan oleh kecakapan, pengalaman dan juga kesungguhan untuk menghasilkan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini berupa target-target yang sudah direncanakan untuk dicapai. Tanpa adanya target ataupun tujuan, kinerja individu atau kelompok tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada arah dan tolak ukurnya (Nina Rahma Melina Djamil, 2019). Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni dalam buku (Sujarweni, 2020) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja ialah hasil kerja yang telah tercapai oleh individu atau sekelompok orang dalam

suatu organisasi.

Sistem Pengukuran Kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu seseorang manajer publik dalam menilai sebuah pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial atau non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan (Nina Rahma Melina Djamil, 2019). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur moneter maupun non moneter. Dengan demikian sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem penilaian bagi para manajer dalam mencapai sebuah strategi.

V. Wiratna Sujarweni dalam buku (Sujarweni, 2020) mengemukakan tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. mewujudkan tanggung jawab publik.
4. untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

2.4 Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan dan mempunyai peran penting dalam lingkungan organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, 2016). Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Dari dua definisi diatas mengenai anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana untuk jangka waktu tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif sebagai pedoman. Data kuantitatif memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik dan bersifat objektif (Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 2015). Data kuantitatif yang digunakan oleh penulis adalah laporan realisasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017-2019. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh penulis adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah:

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari instansi terkait melalui hasil wawancara (Anastasia Friska Palilingan, 2015). Data yang diperoleh dari sumber ini berupa

dokumentasi dan hasil wawancara secara langsung pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2012) . Data sekunder yang penulis dapat dari penelitian ini ialah data dalam bentuk DVD berisi data yang diperlukan penulis untuk penelitian yaitu laporan realisasi anggaran dan data lain yang diperlukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis data berupa dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar. Data yang diperoleh penulis yaitu laporan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2019.

3.3.2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang tepat antara peneliti dengan instansi terkait untuk mencari informasi. Penulis melakukan wawancara kepada sekretaris dan bagian keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mengenai kinerja dalam melakukan realisasi anggaran Tahun 2017-2019 dan informasi lain yang diperlukan dalam menganalisa penilaian kinerja.

3.3.3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, maupun situs-situs yang terdapat di website internet mengenai penilaian kinerja laporan realisasi anggaran yang berguna mendukung dalam penelitian serta dijadikan sebagai landasan teori.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data penelitian yang diperoleh penulis agar dapat menunjukkan pengukuran suatu subjek pada waktu tertentu. Penulis melakukan perhitungan dan analisis tingkat kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait mekanisme penilaian suatu kinerja pada laporan realisasi anggaran, penulis menggunakan beberapa analisis rasio yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas, pada rasio ini tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan asli daerah (PAD)}}{\text{Target penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

2. Rasio efisiensi, pada rasio tingkat efisiensi belanja daerah penulis menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (2)$$

Setelah menentukan beberapa metode analisis yang penulis gunakan, maka penulis melakukan tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis melakukan proses pengumpulan data dan mencari informasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Penulis

menggunakan cara pengumpulan diantaranya yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, studi pustaka, wawancara.

b. Reduksi data

Dalam tahapan ini penulis melakukan pemilihan data dengan cara mengelompokkan data yang diperlukan untuk proses penelitian berdasarkan kriteria pada pengelompokkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Perhitungan dan penyajian data

Setelah melakukan proses reduksi data, maka penulis melakukan perhitungan pada data yang telah dikelompokkan sesuai dengan kriteria. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi sesuai dengan data yang diperoleh. Selain itu, penulis melakukan evaluasi dari data yang diperoleh dengan mencari informasi atau teori yang diperoleh penulis. Sehingga penulis dapat menyajikan data yang dapat memudahkan penulis untuk mengdeskripsikan hasil analisis dalam penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dihasilkan sehingga dapat memberikan pemahaman secara jelas dan singkat mengenai informasi hasil akhir dari proses penelitian yang telah dilakukan.

3.4.2 Rasio Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2009) Efektivitas merupakan hubungan antara pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai suatu perbandingan yang didalamnya membandingkan target dan hasil yang sudah dicapai, semakin dekat antara hasil dan target maka semakin efektif perencanaan tersebut. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2015) dalam penelitian (Chumairah N. A., 2020) Rasio Efektivitas yaitu rasio membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan target penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan sesuai dengan yang di targetkan.

Berdasarkan dua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan penerimaan pendapatan asli daerah dan target yang sudah dicapai.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

Tabel 1. Kriteria efektivitas kinerja keuangan

| <i>Presentase Kinerja Keuangan (%)</i> | <i>Kriteria</i> |
|--|-----------------|
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| Dibawah 60% | Tidak Efektif |

Sumber: JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha, Vol : 11 No: 1 Tahun 2020

Berdasarkan analisis Rasio Efektivitas yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

3.4.3 Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009), Efisiensi merupakan pengukuran yang dimana membandingkan antara output yang sudah dihasilkan dengan input yang sudah digunakan. Dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana dari dana yang serendah-

rendahnya. Sedangkan menurut Mahmudi (2015) dalam penelitian (Chumairah N. A., 2020), Rasio Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dan digunakan untuk menghitung tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

Tabel 2. Kriteria efisien kinerja keuangan

| <i>Presentase Kinerja Keuangan (%)</i> | <i>Kriteria</i> |
|--|-----------------|
| Di atas 100% | Tidak Efisien |
| 90%-100% | Kurang Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Dibawah 60% | Sangat Efisien |

Sumber : JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha, Vol : 11 No: 1 Tahun 2020

Berdasarkan analisis Rasio Efisiensi yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang beralamat jalan H. Boejasin, kelurahan Angsau, kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai entitas pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran daerah tahun anggaran 2018 didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku entitas akuntansi. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, serta untuk mendukung penyusunan laporan keuangan Pemerintah kabupaten Tanah Laut Tahun 2019. Salah satu entitas akuntansi telah menyusun laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Untuk menghitung tingkat efektivitas realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, maka diperlukan data anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2019 yang termuat di dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 3. Tingkat efektifitas anggaran pendapatan asli daerah dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten tanah laut tahun anggaran 2017-2019

| <i>No</i> | <i>Periode</i> | <i>Anggaran Pendapatan (Rp)</i> | <i>Realisasi Pendapatan (Rp)</i> | <i>Tingkat efisiensi</i> | <i>Keterangan</i> |
|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2017 | 288.000.000 | 92.500.000 | 37,12 | Tidak Efektif |
| 2 | 2018 | 144.000.000 | 14.000.000 | 9,72 | Tidak Efektif |
| 3 | 2019 | 74.000.000 | 46.500.000 | 62,84 | Kurang Efektif |
| Jumlah Rata-Rata | | | | 34,89 | Tidak Efektif |

Sumber: Data Olahan, (2020)

Dari tabel tingkat efektivitas diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas anggaran Tahun 2017 sampai 2019 sedikit bervariasi. Tahun 2017 ini mendapat sasaran penerimaan anggaran pendapatan asli daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebesar

Rp. 288.000.000 yang terdiri dari Lain- lain Pendapatan asli daerah yang sah. Sampai akhir tahun terdapat realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 92.500.000. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 195.500.000, hal ini diperoleh rasio efektivitas sebesar 32,12% dan dikategorikan tidak efektif karena tingkat persentase yang kurang dari 60%.

Tahun anggaran 2018 , anggaran pendapatan sebesar Rp. 144.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 14.000.000. Dengan selisih jauh yaitu sebesar Rp. 130.000.000, dengan demikian rasio afektivitas pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 9,72% yang dikategorikan tidak efektif. Karena tingkat persentase yang dibawah 60%.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019 ini mendapat sasaran penerimaan pendaptan asli daerah yang sah sebesar Rp. 74.000.000 dan sampai dengan akhir tahun terdapat realisasi penerimaan pendapatan derah sebesar Rp. 46.500.000, pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 62,84% dikategorikan kurang efektif. Hal ini berasal dari hasil pengolahan (sewa pakai) alat dan kapal penangkapan ikan sebesar Rp. 46.500.000.

Tabel 4. Tingkat efektifitas anggaran belanja dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten tanah laut tahun anggaran 2017-2019

| No | Periode | Anggaran Pendapatan (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | Tingkat efisiensi % | Keterangan |
|------------------|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2017 | 7.081.940.525,00 | 5.279.519.415,00 | 74,55 | Efisien |
| 2 | 2018 | 4.248.871.868,00 | 3.831.34.519,00 | 90,17 | Kurang Efisien |
| 3 | 2019 | 8.216.439.854,00 | 7.590.552.624,00 | 92,38 | Kurang Efisien |
| Jumlah Rata-Rata | | | | 85,70 | Cukup Efisien |

Sumber: Data Olahan, (2020)

Dari tabel tingkat efisien menunjukkan keseluruhan belanja daerah selama tahun 2017 sampai 2019. Tahun 2017 menunjukkan anggaran belanja daerah baik atau efisien, dengan rasio efisien diperoleh sebesar 74,55% yang termasuk tingkat kriteria efisien. Tahun 2018 menunjukkan peningkatan persentase tingkat rasio efisien sebesar 90,17%, kenaikan tersebut disebabkan oleh bertambahnya belanja pegawai dan belanja barang. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan persentase tingkat efisien paling tinggi dibandingkan 2018 dan 2017 yaitu sebesar 92, 38% dengan kriteria kurang efisien, peningkatan tersebut terjadi bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bertambahnya belanja hibah, belanja peralatan dan mesin, dan belanja bangunan dan mesin. Secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai 2019 memiliki rata-rata sebesar 85,70% dikategorikan cukup efisien. Hal ini dikarenakan tingkat persentase diatas 80%.

Pada tingkat rasio efisien tersebut tahun 2017 sampai 2019 hanya pada 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bisa mencapai tingkat efisien, ini membuktikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sudah bisa melakukan penghematan anggaran dengan yang telah dilakukan pemerintah.

5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diuraikan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai dengan 2018 memiliki kinerja yang tidak efektif, sedangkan pada tahun 2019 memiliki kinerja kurang efektif. Secara keseluruhan dengan rata-rata sebesar 34,89% termasuk kriteria tidak efektif, sesuai dengan indikator industri apabila berada dibawah 60% dikatakan tidak efektif.
- b. Tingkat rasio belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2017 dikatakan efisien karena memiliki kriteria diatas 70%, sedangkan tahun 2018 dan 2019 dikatakan kurang efisien karena berada diatas 90% sehingga dikategorikan kurang efisien. Dari keseluruhan realisasi anggaran belanja daerah baik itu belanja operasi maupun belanja modal tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai kriteria cukup efisien sebesar 85,70% karena lebih dari 80%.

5.2. SARAN

Untuk dapat meningkatkan penelitian dibidang ini, maka penulis memberikan saran pengembangan penelitian, yakni menganalisis dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran lima atau 6 tahun sehingga dapat memberikan hasil penilaian yang lebih menarik dan bervariasi dari tahun ketahun. Selain itu, kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Efisiensi dalam pengelolaan belanja dengan menggunakannya sebaik mungkin agar dapat mencapai dan keberhasilan dalam merealisasikan anggaran belanja yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kauntitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo Anggota IKAPI.
- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo Anggota IKAPI.
- Anastasia Friska Paililingan, H. S. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 17- 25.
- Anastasia Friska Palilingan, H. S. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, III, 17-25.
- Chumairah, N. A. (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman*, 102.
- Chumairah, N. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 29.
- Elly Susanti, K. R. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Ekonomi-Akuntansi* , 6.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8, No 1, 45.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Sektor Publik.
- Mahsun, M. F. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Heri Prsetyo, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3-4.

Widodo. (2001). *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Biyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP YKPN.

Biodata Penulis



Yuli Fitriyani lahir pada tanggal 16 Juli 1984, Kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penulis memulai pendidikan D-III tahun 2002 di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Penulis kemudian melanjutkan studi Sarjana Strata-1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat pada Tahun 2007. Pada tahun 2012 ia melanjutkan studi S2 di FMIPA Matematika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis bergabung menjadi dosen di Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut pada tahun 2017, selain aktif mengajar ia juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat di hubungi melalui surel yulihazami@politala.ac.id



Tia Febrianti lahir pada tanggal 19 April 2000, di Tanah Laut. Penulis merupakan mahasiswa aktif di Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Penulis merupakan anggota di Forum Studi Islam (FSI Al Ikhwana) dan anggota kewirausahaan di Politeknik Negeri Tanah Laut tahun 2018-2019. Penulis dapat di hubungi melalui surel 1801302051.akt@politala.ac.id